

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup



### Contact

**Phone**  
+62 812-8338-6418

**Email**  
danuwardhana01@gmail.com

**Address**  
Jln. AMD Raya, Rt 05 Rw 01, No.06,  
Pondok Kacang Barat, Pondok, Aren

### Education

Student of Pembangunan Jaya  
University

2020

### Expertise

- Editor
- Photographer
- Videographer
- Content Creator
- Content Writer

### Language

English  
Indonesia

# NUR FAUDZAN DANU

EDITOR

## About Me

I'm a passionate person about the art of photography and videography, and I find immense joy in using my creative skills to bring stories to life. With a keen eye for detail and a love for aesthetics, I strive to capture and immortalize moments that evoke emotions and leave a lasting impact.

## Experience

2018

### BOFMAN 4 Part 10

- Media Team Opening - Closing (Documentation, Editor)

2020 - 2022

### Photographer

- Photo Product for MUA (Balqis Nurul Izzah)
- Photo Model (Balqis Nurul Izzah)
- Wedding Photographer
- Media Partner Documentation (Jakarta Akhir Pekan)

2021 - 2022

### Jakarta Akhir Pekan

#### Content Creator (2021-2022)

- JAP X CAPM Collaboration Live Session (Cameraman, Editor)
- Farrel Hilal Live Session Half Four (Cameraman)
- Weekly Content Playlist Akhir Pekan, Musik Akhir Pekan (Graphic Designer)
- Content Writer Rekomendasi Film Agustus
- MV AMERTA Behind the Scene's (Editor)

#### Media Partner Team

- Pasar Musik (June 2022)
- Nyari Gigs (June 2022)
- The Sound Project Vol.5 (August 2022)

#### Event Organizer

- Screening Film (April 2022)
- Sandae Market (April 2022)
- Made in Manama (May 2022)
- Disini Ada Pesta (May 2022)
- Sandae Music (July August)

2022-2023


- Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Dana Usaha)
- Collaboration Festival 2023 (Documentation Team)
- Carereers Job Fair 2023 (Documentation Team)

Lampiran 2. Sertifikat LDK





## Lampiran 4. Formulir Penganjuan Skripsi

	<b>FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/03/SOP-28/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Nur Faudzan Danu Adi Wardhana




Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041130

Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN PENOLAKAN PENGUNGSI ROHINGYA DI PORTAL BERITA ONLINE (Analisis Framing Pemberitaan Pada Serambinews.com dan Republika Online Periode November 2023 – Januari 2024)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	V	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	V	
3	IPK minimal 2,00	V	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	V	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	V	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	V	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	

Tangerang Selatan, 21 Maret 2024

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
(Nur Faudzan Danu Adi W) Mahasiswa	(Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.) Dosen PA	(Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom) Kaprodi

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555



## Lampiran 5. Formulir Pengajuan Sidang Skripsi

	<b>FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Nur Faudzan Danu Adi Wardhana  
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041130  
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN PENOLAKAN PENGUNGSI ROHINGYA DI PORTAL BERITA ONLINE (Analisis Framing Pemberitaan Pada Serambinews.com dan Republika Online Periode November 2023 – Februari 2024)

Dosen Pembimbing : <sup>1</sup> Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.



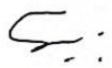

Dosen Penguji : 1. \_\_\_\_\_ JAD : \_\_\_\_\_  
 : 2. \_\_\_\_\_ JAD : \_\_\_\_\_  
 : 3. \_\_\_\_\_ JAD : \_\_\_\_\_

Jadwal Sidang : Tempat : \_\_\_\_\_ Hari/Tanggal: \_\_\_\_\_


Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	V	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	V	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	V	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	V	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	V	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	V	

Tangerang Selatan, 14 Juni 2024

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
(Nur Faudzan Danu A.W) Mahasiswa	(Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.) Dosen Pembimbing	(Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.) Koordinator Skripsi/TA	(Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom) Kaprosdi

## Lampiran 6. Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi

	<b>FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA</b>	SPT-I/03/SOP-28/F-03
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Nur Faudzan Danu A.W  
 Nim/Prodi : 2020041130 / Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Peningkatan Pemberitaan Penolakan Pengungsi Rohingya di Portal Berita Online (Analisis Framing Pemberitaan Pada Serambinews.com dan Republika Online Periode November 2023 – Januari 2024)

Telah **disetujui** untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	0310079105	Asisten Ahli

Tangerang Selatan, 30 April 2024

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
		
Koordinator Skripsi/TA Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Kaprodi Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom	Dosen Pembimbing 1 Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.

## Lampiran 7. Cek Plagiasi



**7.16%**

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 24 JUL 2024, 5:54 PM

### Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

<span style="color: red;">●</span> IDENTICAL	<span style="color: orange;">●</span> CHANGED TEXT	<span style="color: blue;">●</span> QUOTES
0.41%	6.74%	4.78%

### Report #22147831









BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Saat bulan November 2023 Indonesia tengah memperbincangkan mengenai pengungsi Rohingya yang kembali datang ke Indonesia untuk mengungsi karena mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh penduduk dan pemerintahan Myanmar. Karena



## Lampiran 8. Bukti Bimbingan Skripsi

Detail	NIM	2020041130	Nama Mahasiswa	NUR FAUDZAN DANU ADI WARDHANA
Bimbingan	Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	<b>138 SKS</b>
Rekap Percakapan Bimbingan	Tgl. Mulai	7 Mei 2024	Judul Tugas Akhir	PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN PENOLAKAN PENGUNGSY ROHINGYA DI PORTAL BERITA ONLINE (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PADA SERAMBINNEWS.COM DAN REPUBLIKA PERIODE NOVEMBER 2023 – JANUARI 2024)
Syarat Ujian				
Jadwal Ujian				
Nilai Ujian				
Nilai Akhir				

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	15 Februari 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Bimbingan Pertama	✓	
2	29 Juni 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Revisi Bab 1	✓	
3	1 Maret 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Revisi Bab 2	✓	
4	20 Maret 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Bimbingan Bab 3	✓	
5	29 Mei 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Bimbingan Kelima	✓	
6	7 Juni 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Bimbingan Ke-6	✓	
7	11 Juni 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Bimbingan Ke-7	✓	
8	12 Juni 2024	Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.	Bimbingan Ke-8	✓	

data/detail/5311

Lampiran 9. Sertifikat *English Score*



The certificate is issued by the British Council. It certifies that Nur Faudzan Danu Adi Wardhana has achieved a CEFR B2 level in the EnglishScore Core Skills test. The score is 470, with sub-scores of Grammar 437, Vocabulary 472, Reading 455, and Listening 514. The certificate is valid from 28 Feb 2024 and includes a verification code 6a489477. It is signed by Joanna Pearson, Director of New Product Development at the British Council. The certificate is accredited and endorsed by Universitas Pembangunan Jaya.

**BRITISH COUNCIL**  
**EnglishScore**

This is to certify that

**Nur Faudzan Danu Adi Wardhana**

has achieved CEFR B2 in the **EnglishScore Core Skills** test

**470**

Grammar 437 Vocabulary 472 Reading 455 Listening 514

**CEFR B2 · Upper Intermediate**

Valid from **28 Feb 2024**

✓ **Verified** Use code **6a489477** at [englishscore.com/verify](https://englishscore.com/verify)

**CORE SKILLS**

**Joanna Pearson**  
English & Exams, Director of New Product Development  
**British Council**

Accredited and endorsed by

**BRITISH COUNCIL**

Universitas Pembangunan Jaya

## Lampiran 10. Berita Republika Online dan Serambinews.com

No

Berita

1. <https://republika.co.id/berita/s6xzc2320/polda-aceh-catat-terjadi-21-kali-aksi-penolakan-warga-terhadap-pengungsi-rohingya>

### Polda Aceh Putusan Catat Terjadi 21 Kali Aksi Penolakan Warga Terhadap Pengungsi Rohingya



REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Kepolisian RI Daerah (Polda) Aceh mencatat 21 kali aksi masyarakat menolak kehadiran imigran Rohingya di provinsi ujung barat Indonesia tersebut dalam rentang waktu sebulan terakhir karena masyarakat mengkhawatirkan keberadaan mereka.

Kepala Urusan Mitra Subbid Penmas Bidang Humas Polda Aceh Kompol Yasir di Banda Aceh, Senin (8/1/2024), mengatakan penolakan tersebut didasari kekhawatiran masyarakat terhadap imigran Rohingya yang berdatangan ke Aceh tanpa ada penanganan yang pasti dari pihak terkait.

"Terhitung 8 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, kami mencatat ada 21 aksi penolakan masyarakat dan mahasiswa terhadap imigran Rohingya. Penolakan ini karena berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan imigran tersebut," katanya.

Yasir mengatakan, kedatangan imigran Rohingya tersebut diduga terkait campur tangan sindikat penyelundupan manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya 24 kasus terkait tindak pidana perdagangan orang terhadap imigran Rohingya.

---

Dari 24 kasus tersebut, katanya, kepolisian menangkap 45 orang yang ada kaitannya dengan sindikat tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan imigran Rohingya ke Aceh.

"Karenanya, perlu adanya kewaspadaan terhadap penyelundupan manusia di balik kedatangan imigran Rohingya di Aceh, sehingga tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di kemudian hari," kata Yasir.

Perwira menengah Polda Aceh itu mengatakan Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsian 1951. Artinya, Indonesia tidak berkewajiban menampung para imigran Rohingya tersebut.

Menurut Yasir, para imigran Rohingya tersebut berasal dari kamp pengungsian di Bangladesh, seperti Cox Bazar. Mereka bisa kabur dari tempat pengungsian tersebut karena ada kelonggaran dan kelengahan pengawasan.

Namun, kata Yasir, yang menjadi fokus kepolisian sekarang ini melakukan pengamanan terhadap imigran Rohingya tersebut guna mencegah konflik sosial dengan masyarakat.

"Sedangkan kewenangan penanganan imigran Rohingya tersebut merupakan ranahnya UNHCR, lembaga PBB yang mengurus pengungsian internasional," kata Yasir.

- 
2. [https://republika.co.id/berita/s6opvd409/wacana-relokasi-137-pengungsi-rohingya-ke-gedung-pmi-aceh-ditolak-warga-setempat#google\\_vignette](https://republika.co.id/berita/s6opvd409/wacana-relokasi-137-pengungsi-rohingya-ke-gedung-pmi-aceh-ditolak-warga-setempat#google_vignette)
-

---

**Wacana Relokasi 137 Pengungsi Rohingya ke Gedung PMI Aceh Ditolak Warga Setempat**



REPUBLIKA.CO.ID, ACEH BESAR -- Wacana relokasi 137 orang etnis Rohingya dari basement Balai Meuseuraya Aceh (BMA) ke gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh di Jalan Ajuen Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, ditolak warga setempat lantaran dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik serta merugikan masyarakat setempat. Penolakan itu muncul setelah sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, keuchik (kepala desa), serta Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Darul Imarah dan Peukan Bada melakukan rapat koordinasi di gedung PMI Aceh pada Rabu (3/1/2024).

“Saya bawa hasil rapat hari ini adalah keputusan seluruh warga Gampong Ajuen, bahwa mereka keberatan dengan ditempatkan pengungsi Rohingya di PMI Aceh. Kami keberatan, alasan keamanan dan banyak hal lainnya,” kata Keuchik Gampong Ajuen Ferdiansyah di Aceh Besar.

Ia menjelaskan, Gampong Ajuen merupakan kawasan padat penduduk. Apabila para pengungsi tersebut tetap ditempatkan di gedung PMI Aceh maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dari masyarakat sekitar lokasi, baik Kecamatan Darul Imarah maupun Peukan Bada.

“Gampong Ajuen kawasan padat penduduk, dibawa pengungsi (ke sini), saya takut ada gejolak lain nanti yang tidak bisa diprediksi. Dikhawatirkan ada seperti kejadian di tempat-tempat lain, ada demo mungkin, tapi saya tidak bisa memastikan,” ujarnya.



---

Hal senada juga disampaikan Junaidi, tokoh masyarakat Gampong Ajuen, yang merasa keberatan para pengungsi Rohingya ditempatkan di gedung PMI Aceh. Apalagi, kata dia, selama ini penanganan Rohingya di Aceh banyak menimbulkan masalah, sehingga dikhawatirkan juga akan terjadi hal yang sama.

“Masalah itu muncul karena karakter bawaan Rohingya berbeda dengan kita, kemudian kesiapan kita dalam mengelola pengungsi belum begitu bagus, sehingga banyak masalah muncul pada Rohingya itu sendiri yang dampaknya akan melebar ke masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, warga Gampong Ajuen menolak penempatan pengungsi Rohingya di gedung PMI Aceh, dan meminta pemerintah untuk mencari solusi lain yang tepat, yang tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat baik aspek sosial, maupun aspek hukum.

Selain itu, Ketua Pemuda Gampong Ajuen Reza Aulia menilai para pengungsi Rohingya itu sulit dijaga untuk tetap berada di lokasi penampungan. Warga khawatir para pengungsi dapat dengan mudah meninggalkan penampungan sehingga akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Kami menolak para pengungsi Rohingya ditempatkan di PMI di Gampong Ajuen karena disini langsung bersinggungan dengan masyarakat. Jadi akan sangat kewalahan dari pihak masyarakat, maupun dari pihak keamanan untuk mengawasi mereka,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, berdasarkan pengalaman dari beberapa lokasi penampungan sementara etnis Rohingya lainnya di Aceh, banyak dari para pengungsi tersebut kabur dari penampungan sehingga sangat meresahkan warga.

“Yang kita jaga adalah manusia. Begitu kita jaga di pintu A, mereka akan cari kesempatan untuk keluar dari pintu B,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemindahan para pengungsi etnis Rohingya di Aceh ke gedung PMI Aceh disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD. Pernyataan itu muncul usai ratusan mahasiswa di Aceh menggelar aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Meuseuraya Aceh usai pendaratan di pantai Blang

---

---

Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar pada Ahad (10/12/2023) lalu.

---

3. <https://www.republika.id/posts/49332/ada-penghasut-di-balik-isu-pengusiran-rohingya>

**Ada Penghasut di Balik Isu Pengusiran Rohingya**



JAKARTA — Pengusiran pengungsi Rohingya dari tempat penampungan di Banda Aceh diklaim bukan niatan para mahasiswa yang terlibat. Ada provokator yang disebut bermain dibalik kejadian dan isu tersebut.

Koordinator Aksi Penolakan Pengungsi Rohingya, Teuku Wariza, buka suara soal kericuhan yang sampai menjadi sorotan dunia internasional. Menurut Wariza, aksinya tersebut disusupi oleh provokator. Tujuan inti dari gerakan itu bukanlah mengusir secara langsung para pengungsi Rohingya, melainkan mendesak pemerintah dan DPRA untuk menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya.

“Itu ada indikasi provokator yang memang kita sudah cek dari presiden mahasiswa Unaya (Universitas Abulyatama). Dia (provokator) tidak terlibat dalam konsolidasi dan dia juga tidak dikenal oleh kawan-kawan Unaya. Dugaan kuat kita mereka itu provokator,” ujar Wariza kepada Republika, akhir pekan lalu.

Wariza merinci lebih lanjut soal gerakan aksi yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara pada pekan lalu itu. Rute aksi yang telah ditentukan diawali dengan bergerak ke titik kumpul di Taman Safiatuddin, Banda Aceh. Dari sana, massa aksi bergerak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Di sana, massa aksi menyuarkan tuntutan.

---

---

“Meminta DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, untuk segera mengeluarkan statement penolakan Rohingnya,” kata dia.

Selesai aksi di DPRA, massa aksi melanjutkan perjalanan ke Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA), di mana tempat pengungsi Rohingya ditampung. Di sana, sebagai koordinator aksi, Wariza mengarahkan massanya untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah sholat. Tapi, kemudian terdengar kata "serbu!".

“Kita shalat, kita makan bersama di situ. Tapi tiba-tiba ketika mobil komando sudah sampai di titik, ada rombongan orang yang menyatakan ‘serbu!’,” kata Wariza.

Dari sanalah, menurut dia, kejadian yang viral hingga ke media internasional itu terjadi. Wariza mengaku masih mencari pelaku provokator yang membuat itu terjadi. Setelah kejadian, kata dia, terlihat jaket almamater Unaya yang tercecer. Dia menduga jaket itu milik provokator. Sebab, massa yang dia bawa tidak merasa kehilangan almamater.

“Ini lagi proses pencarian yang kita tidak kenal. Itu susah. Kemudian juga kita meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh jika dalam gerakan kita ini bisa dimasuki provokator. Itu memang di luar kendali saya sebagai koordinator,” terang dia.

Menurut dia, gerakan yang dia buat itu tidak menasar langsung kepada pengungsi Rohingya. Selain kepada DPRA, pihaknya juga mencecar pemerintahan Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya di wilayahnya. Pihaknya meminta Kemenkumham Aceh dan Imigrasi setempat untuk lekas menandatangani petisi yang pihaknya berikan.

“Ke depan harapannya kita ini dari pemerintah Aceh mampu untuk segera memindahkan Rohingnya dari luar Aceh dan juga kita meminta kepada Kemenkumham Aceh ataupun imigrasi untuk segera menandatangani petisi kita sebelum gejolak mahasiswa ini semakin panas,” kata Wariza.

Nama Wariza menjadi perbincangan di jagad maya setelah videonya mengatasnamakan masyarakat Aceh dimuat oleh media asal Qatar, Aljazeera. Di sana, dia mengaku mewakili masyarakat Aceh meminta DPRA untuk lekas membuat pernyataan soal penolakan pengungsi Rohingya.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh menyatakan perlu adanya sosialisasi masif ke masyarakat termasuk mahasiswa untuk meredam eskalasi narasi negatif isu pengungsi Rohingya. “Indonesia (pemerintah) dalam hal ini

---

---

otoritasnya harus menjelaskan ke publik bahwa selama ini telah beredar misinformasi dan disinformasi terkait pengungsi Rohingya yang telah berakibat fatal,” kata Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, di Banda Aceh, Jumat.

Husna menuturkan, isu penolakan Rohingya pertama sekali berembus pada 2022 atau kedatangan ke-39 kalinya di pesisir laut wilayah Aceh sejak 7 Januari 2009. Saat itu, penolakan datang dari kalangan masyarakat di Bireuen, lalu di Lhokseumawe.

Namun, belakangan ini penolakan dari masyarakat semakin parah, puncaknya saat aksi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara pada Rabu (27/12) lalu yang memindahkan paksa 137 Rohingya dari Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA).

“Mengapa mahasiswa ini yang seharusnya bertindak membela rakyat marginal, justru bertindak anarkis pada pengungsi?. Jika yang berwenang melakukan tugas dan tanggung jawabnya mungkin itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Husna, serangan kebencian tidak saja menasar pengungsi Rohingya, tetapi ikut juga menargetkan staf pekerja kemanusiaan dan pihak-pihak yang dinilai mendukung atau pro pengungsi.

“Di Aceh, ulama saja sekarang tidak dipercaya apabila angkat bicara yang isinya pro pengungsi. Ini artinya narasi negatif yang terbangun soal pengungsi sudah pekat dengan publik,” katanya.

Dirinya menilai, eskalasi konflik tersebut tidak hanya timbul begitu saja menimbang isu pengungsi sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Ia berpendapat fenomena ujaran kebencian yang ada tidak lepas dari penggiringan narasi dari sejumlah pihak.

Usut penghasut

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hilmy Muhammad, mengaku prihatin dengan aksi ratusan mahasiswa yang menolak pengungsi Rohingya di Banda Aceh, pada Rabu (27/12/2023) lalu. Ia menyesalkan terbentuknya aliansi Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya dan mempertanyakan pihak di balik gerakan tersebut.

---

---

"Kita sangat prihatin. Gabungan mahasiswa membentuk aliansi yang menolak para pengungsi Rohingya, siapa yang memfasilitasi mereka? Aparat keamanan perlu mengusut ini," kata Hilmy, Sabtu (30/12/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut mengatakan tindakan para mahasiswa tersebut menunjukkan adanya banyak celah masalah dalam kehidupan mereka sebagai kaum terpelajar. Dirinya juga sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut.

"Bagaimana mungkin mereka berlaku kasar mengusir pengungsi Rohingya. Tindakan ini membuka banyak celah masalah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya perilakunya mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya mereka," ucapnya.

Selain itu, Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang juga merupakan dasar negara. Dirinya mengingatkan kembali nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

"Mereka tidak sadar bahwa Pancasila kita menempatkan kemanusiaan sebagai sila kedua sesudah sila ketuhanan? Apa mereka tidak belajar dari bantuan internasional yang diberikan kepada rakyat Aceh, bahkan hingga hari ini, paska bencana tsunami?," ungkap Gus Hilmy.

Anggota Komite I DPD RI tersebut mengatakan negara sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur para pengungsi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Termasuk dalam pemilihan lokasi para pengungsi merupakan bagian dari pelaksanaan dari Perpres tersebut.

"Negara tentu tidak boleh tinggal diam dengan adanya pengungsi Rohingya ini. Ada upaya-upaya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kita harus menghormati ini agar nama baik Indonesia tidak tercoreng di mata dunia," tutur Gus Hilmy.

Di sisi lain, Gus Hilmy mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. Dirinya mengaku prihatin terhadap isu-isu negatif yang berkembang di media sosial, utamanya yang menyudutkan para pengungsi, ungkapan-ungkapan kebencian dan diskriminasi.

---



- 
4. <https://www.republika.id/posts/49295/pengusiran-rohingya-oleh-mahasiswa-tak-elok>

**'Pengusiran Rohingya oleh Mahasiswa tak Elok'**



JAKARTA -- Tindakan sejumlah kelompok mahasiswa Aceh mengusir pengungsi Rohingya dari tempat penampungan mereka disayangkan sejumlah pihak. Persoalan gelombang kedatangan etnis Rohingya di Aceh tak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan.

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Ilham Rizky Maulana menyatakan menyayangkan tindakan sekelompok mahasiswa yang mengusir para pengungsi Rohingya. Ilham mengatakan, apa yang kelompok mahasiswa lakukan tersebut tidak merepresentasikan seluruh mahasiswa Aceh.

"Bagi kita tidak merepresentatifkan daripada seluruh mahasiswa Aceh. Itu mungkin yang bisa kita koreksi," jelas Ilham kepada Republika, Jumat (29/12/2023).

Ilham menjelaskan, sejatinya pihaknya mendukung tindakan mahasiswa yang hendak menjadi penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan keresahan soal pengungsi Rohingya. Tapi, apa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa itu kepada pengungsi Rohingya di Gedung Balee Meuseuraya Aceh dia lihat sebagai tindakan yang tidak terpuji.

"Ada oknum beberapa mahasiswa yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji bagi kami. Jadi itu yang kami rasa sangat-sangat disayangkan. Masih banyak cara-cara lain yang lebih beretika," kata Ilham.

Kasus pengusiran itu merupakan insiden teranyar terkait keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang pengungsi Rohingya tiba di Aceh dalam jumlah besar

---

sejak 2022 lalu. Para pengungsi itu melarikan diri dari pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh. Sejutaan etnis Rohingya tinggal terlunta-lunta di kamp pengungsian itu setelah melarikan diri dari genosida yang dijalankan militer Myanmar pada 2017-2018 lalu.

Ilham menuturkan, terlepas dari berbagai isu yang ada terkait kedatangan para pengungsi dari Myanmar itu, perlu dipahami mereka adalah kaum yang tertindas. Mahasiswa yang merupakan penyambung lidah kaum tertindas, kata dia, tidak sepatutnya melakukan hal-hal semacam itu kepada mereka.

"Yang perlu kita ketahui mereka ini adalah kaum yang tertindas dan tidak sepatutnya kita selaku mahasiswa yang sebagai penyambung lidah daripada kaum tertindas melakukan hal-hal yang seperti itu," jelas dia.

Lagipula, yang semestinya dicecar oleh mahasiswa menurut Ilham bukanlah para pengungsi, melainkan pemerintah. Dia mengakui, pemerintah semestinya dapat lebih tegas menyikapi persoalan Rohingya agar tak menjadi masalah yang berkepanjangan. Dia menganalogikan isu pengungsi Rohingya ini bagai makan buah simalakama.

"Ketika kita terima tentu berdampak jangka panjang dalam tatanan sosial masyarakat ketika kita tidak menerimapun itu bertabrakan dengan moral kita selaku kemanusiaan," terang Ilham.

Dia pun berharap agar isu pengungsi Rohingya ini menjadi isu pemecah persatuan di Indonesia, khususnya di Aceh. Ilham melihat sudah ada arah menuju ke sana untuk saat ini. Menurut dia, masih ada hal genting lain yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa ini untuk saat ini dan ke depan.

"Ada yang pro, ada yang kontra. Di mahasiswa juga ada yang pro ada yang kontra. Ini jangan sampai menjadi isu pemecah karena ada hal urgen lain yang harus kita selesaikan secara bersama," jelas Ilham.

Pengusiran pengungsi Rohingya oleh kelompok mahasiswa di Aceh menjadi sorotan internasional. Media asal Qatar, Aljazirah, memberitakan peristiwa tersebut dengan menyoroti serbuan ratusan mahasiswa tersebut kepada 137 pengungsi Rohingya yang berada di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA).

“Ratusan mahasiswa di provinsi paling barat Indonesia di Aceh telah menyerbu tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya, menuntut mereka dideportasi,” bunyi berita tersebut seperti dilansir Republika, Jumat (29/12/2023).

Dalam berita tersebut, tindakan kelompok mahasiswa ini disebut sebagai episode baru diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang dianiaya di Myanmar. Di mana sebelumnya sudah ada penolakan terhadap lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya saat tiba di pantai Aceh sejak pertengahan November lalu.

Video yang beredar menunjukkan para mahasiswa, yang mengenakan jaket dan lencana universitas beragam, berlari ke tempat para Rohingya berada. Mereka berlari mengusir sembari meneriakkan “tolak Rohingya di Aceh!” dan “usir mereka!”.

Para mahasiswa itu juga tampak menendang barang-barang milik pengungsi yang ada di sana. Para pengungsi yang terdiri dari wanita, laki-laki, dan anak-anak terlihat duduk dan di antara mereka ada yang menangis ketakutan.

“Pendemo membakar ban dan berkelahi dengan polisi yang melindungi pengungsi yang ketakutan, tapi petugas pada akhirnya mengizinkan pemindahan pengungsi oleh para pelajar,” dilansir agensi berita AFP.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, para pengungsi Rohingya yang diusir oleh kelompok mahasiswa di Aceh akan ditempatkan di dua lokasi aman, yakni di gedung Palang Merah Indonesia (PMI) dan gedung Yayasan Aceh. Mahfud mengatakan, mereka akan dijaga oleh aparat keamanan.

“Saya sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi-pengungsi Rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman. Satu, ditempatkan di gedung PMI. Yang sebagian lagi ditempatkan di gedung Yayasan Aceh. Dan saya sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga karena ini soal kemanusiaan,” ujar Mahfud lewat rekaman video, dikutip Jumat (29/12/2023).

Mahfud mengatakan, tindakan yang diambilnya ini dilandasi dengan alasan kemanusiaan. Sebab, kata dia, Indonesia tidak punya ikatan lain selain ikatan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya. Indonesia, kata dia, tidak terikat dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi yang menjadi asal mula Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR.

“Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya daripada terkatung-katung di laut kita tampung dulu sementara nanti dikembalikan melalui PBB. Karena yang punya aturan itu PBB. Kita sendiri kalau mau ngusir sekarang juga bisa. Karena kita tidak ada urusan. Tetapi ini kan urusan kemanusiaan,” terang dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan, pemerintah Indonesia menerima kehadiran pengungsi Rohingya hanya atas pertimbangan kemanusiaan. Apabila hal itu kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, maka pemerintah tidak tertutup kemungkinan akan bertindak keras untuk menolak penyalahgunaan itu.

“Kita sebetulnya dalam menerima kehadiran mereka itu pertimbangan kemanusiaan saja. Tetapi kalau pertimbangan kemanusiaan itu kemudian telah disalahgunakan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara yang tidak bertanggung jawab, ya kita akan bisa bertindak keras untuk menolak itu,” ucap Muhadjir saat ditemui di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Muhadjir menegaskan, pemerintah Indonesia tidak memiliki ikatan apa pun dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Sebab itu upaya mengembalikan para pengungsi yang ada di Indonesia agar berada di bawah tanggung jawab lembaga internasional yang membidangnya itu perlu dilakukan. Dia menyatakan, dirinya hanya akan menangani persoalan pengungsi Rohingya dari sisi kemanusiaannya.

“Dan kita juga harus segera mengembalikan mereka yang sekarang berada di Indonesia agar berada di bawah tanggung jawab lembaga internasional yang memang membidangi itu,” kata dia.

- 
5. [https://news.republika.co.id/berita/s5pwpb409/warga-desa-titie-baroe-aceh-timur-unjuk-rasa-desak-imigran-rohingya-dipindahkan?#google\\_vignette](https://news.republika.co.id/berita/s5pwpb409/warga-desa-titie-baroe-aceh-timur-unjuk-rasa-desak-imigran-rohingya-dipindahkan?#google_vignette)
-

---

**Warga Desa Titi Baroe Aceh Timur Unjuk Rasa, Desak Imigran Rohingya  
Dipindahkan**



REPUBLIKA.CO.ID, ACEH TIMUR -- Warga Desa Titi Baroe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, mendesak instansi terkait segera memindahkan puluhan imigran Rohingya yang saat ini ditampung di Idi Sport Center (ISC). Desakan diawali dengan unjuk rasa para pemuda desa.

"Semalam pemuda desa semua berunjuk rasa di lokasi penampungan Rohingya di ISC. Mereka mendesak imigran tersebut segera dipindahkan," kata Keuchik atau Kepala Desa Titi Baroe, Muhammad Adam, di Aceh Timur, Jumat (15/12/2023).

Sebelumnya, sebanyak 50 imigran Rohingya ditampung di ISC setelah diturunkan dari kapal di kawasan pantai Desa Seuneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, pada Kamis (14/12) sekitar pukul 03.45 WIB. Sebelum ditampung di pusat olahraga masyarakat Kabupaten Aceh Timur tersebut, puluhan imigran Rohingya sempat lari dan bersembunyi di semak-semak sebelum akhirnya ditemukan.

Muhammad Adam mengatakan penolakan keberadaan imigran Rohingya di pusat olahraga tersebut karena mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. "Tempat penampungan Imigran Rohingya itu lapangan futsal. Lapangan itu setiap hari dipakai semua kalangan, baik anak-anak maupun pemuda dari beberapa kecamatan di Aceh Timur," ujarnya.

Menurut dia, keberadaan imigran Rohingya tersebut menyebabkan aktivitas olahraga masyarakat terganggu. Oleh sebab itu, masyarakat mendesak imigran tersebut segera dipindahkan.

---



---

"Persoalan ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami juga mengimbau masyarakat tidak berbuat hal-hal yang merugikan terkait keberadaan imigran Rohingya tersebut," katanya.

Kepala Satuan Polisi (Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Timur Teuku Amran mengatakan pihaknya sudah menerima informasi masyarakat yang meminta imigran tersebut dipindahkan dari tempat penampungan di ISC.

"Sampai saat ini belum adanya keterangan resmi dari pihak UNHCR, selaku yang menangani imigran Rohingya, sehingga pemerintah daerah menampung mereka di ISC. Kalau pihak UNHCR sudah datang, imigran Rohingya tersebut segera dipindahkan," kata Teuku Amran.

- 
6. <https://news.republika.co.id/berita/s5ixsu7525000/jokowi-pemerintah-tetap-tampung-pengungsi-rohingya>

**Jokowi: Pemerintah Tetap Tampung Pengungsi Rohingya**



JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memutuskan masih akan terus menampung para pengungsi Muslim Rohingya yang terdampar di Aceh. Sementara penolakan-penolakan warga setempat masih terus mengemuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan menampung para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh untuk sementara waktu. Selain itu, pemerintah juga masih akan membahas upaya penanganannya bersama organisasi-organisasi internasional.

---

---

"Saya sampaikan sementara kita tampung. Sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain," kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Koordinasi dengan organisasi-organisasi internasional akan terus dilakukan mengingat adanya penolakan pengungsi Rohingya dari masyarakat setempat. "Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," kata Jokowi.

Sebelumnya Jokowi telah mendapatkan laporan mengenai semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Aceh. Karena itu, untuk sementara, pemerintah akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.

"Dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah para pengungsi tersebut. Presiden juga menyebut bahwa pemerintah menduga kuat terjadi tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Karena itu, ia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas para pelaku TPPO pengungsi Rohingya tersebut.

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," kata Jokowi. Saat ini, etnis Rohingya masih terus menghadapi penolakan warga. Masyarakat lokal mengatakan bahwa mereka jengah dengan lonjakan jumlah perahu yang membawa etnis minoritas yang teraniaya tersebut ke pantai-pantai mereka.

Lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak bulan November, menurut data dari badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), dan sedikitnya 300 orang lagi tiba akhir pekan lalu. "Masih banyak orang miskin di sini," kata Ella Saptia, 27 tahun, seorang penduduk Pidie di provinsi Aceh.

Ia melihat orang-orang Indonesia telah banyak bersimpati pada pria, wanita dan anak-anak di antara para pengungsi Rohingya. Di mana mereka dibawa dengan kapal-kapal yang rusak dan terombang ambing, demi mencari tempat untuk bermukim selama bertahun-tahun.

---

---

"Mengapa kita harus mengurus ribuan orang Rohingya yang menyebabkan banyak masalah?" tambahnya. "Mereka membawa pengaruh buruk."

Pekan lalu, para pengunjung rasa di pulau Sabang, Aceh, membongkar tenda-tenda yang didirikan sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya. Bahkan warga lokal ikut mengancam akan mendorong perahu mereka kembali ke laut.

Babar Baloch, juru bicara UNHCR untuk wilayah Asia, mengatakan bahwa badan tersebut "khawatir" dengan laporan tersebut, yang dapat membahayakan nyawa mereka yang berada di atas kapal.

Kedatangan cenderung melonjak antara bulan November dan April, ketika laut lebih tenang, dan para Rohingya naik perahu ke negara tetangga Thailand dan Indonesia serta Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim.

"Terlalu banyak orang Rohingya di Aceh," kata Desi Silvana, 30 tahun, salah seorang pengungsi yang tinggal di daerah tersebut. "Tahun ini ada ratusan, bahkan ribuan yang datang."

Sebanyak 137 pengungsi Rohingya yang dibawa dari Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh ke UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial di Gampong Ladong, Aceh Besar, kembali ditolak oleh masyarakat setempat.

Salah seorang warga Ladong Armansyah di Aceh Besar, Senin, mengatakan warga menolak para Rohingya ditempatkan di Ladong karena pengalaman yang sebelumnya, banyak dari Rohingya itu kabur dari tempat penampungan sehingga meresahkan warga setempat. "Gelombang pertama Rohingya ke sini dulu kami sudah menerima, tapi tingkah lakunya banyak berefek, terganggu dengan masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, banyak dari pengungsi Rohingya yang sebelum ditempatkan di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial juga melarikan diri dari penampungan. "Banyak mereka keluar melarikan diri dari sini, (takut) hilang punya warga, berkonflik dengan warga, dan segala macam," katanya.

ANTARA melaporkan, puluhan masyarakat Ladong berdiri di depan UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial, untuk menghalangi agar para

---

---

pengungsi Rohingya itu tidak ditempatkan di sana. Dengan begitu, kelompok pengungsi tersebut sudah lima kali dipindahkan karena penolakan warga sejak mereka mendarat di Aceh Besar pada Ahad (10/12/2023) pagi.

Para pencari suaka itu diberangkatkan ke UPTD Dinas Sosial Aceh itu dari Taman Ratu Safiatuddin, yang terletak tak jauh dari Kantor Gubernur Aceh.

Sebelum ditolak masyarakat Ladong, para pengungsi itu sudah mengalami penolakan dari sejumlah tempat, seperti Lamreh, Aceh Besar dan Scout Camp Pramuka di Pidie.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Aceh Azmanto di Banda Aceh mengatakan pihaknya diperintahkan untuk membawa muslim Rohingya ke Ladong untuk sementara. Kata dia, warga rohingya tersebut rencananya hanya sekitar sepekan di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial.

"Tadi pihak UNHCR juga sudah ada, IOM hadir juga. Jadi, hanya satu minggu. Kami mewakili Satpol PP dan Pemerintah Aceh hanya mengantarkan ke Ladong," ujarnya.

Menurut dia, UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial merupakan milik Pemerintah Aceh sehingga dinilai tidak mungkin ada penolakan. "Jadi, kita sudah koordinasikan dengan pihak Ladong, jadi sudah menerima disana. Seminggu, nanti pihak UNHCR cari solusi lagi bagaimana, dimana akan ditempatkan," kata Azmanto.

---

7. <https://internasional.republika.co.id/berita/s5i4f8383/pengungsi-rohingya-yang-tiba-di-aceh-terus-mendapat-penolakan-dari-warga-lokal>

---

---

**Pengungsi Rohingya yang Tiba di Aceh Terus Mendapat Penolakan dari Warga Lokal**



REPUBLIKA.CO.ID, PIDIE -- Etnis Rohingya dari Myanmar menghadapi gelombang penolakan di Indonesia. Penolakan terbesar karena alasan, di mana masyarakat lokal atau setempat mengatakan mereka tak suka dengan lonjakan jumlah perahu yang membawa etnis minoritas yang teraniaya tersebut ke pantai-pantai mereka.

Lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak bulan November, menurut data dari badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), dan sedikitnya 300 orang lagi tiba akhir pekan lalu. "Masih banyak orang miskin di sini," kata Ella Saptia, 27 tahun, seorang penduduk Pidie di provinsi Aceh.

Ia melihat orang-orang Indonesia telah banyak bersimpati pada pria, wanita dan anak-anak di antara para pengungsi Rohingya. Di mana mereka dibawa dengan kapal-kapal yang rusak dan terombang ambing, demi mencari tempat untuk bermukim selama bertahun-tahun.

"Mengapa kita harus mengurus ribuan orang Rohingya yang menyebabkan banyak masalah?" tambahnya. "Mereka membawa pengaruh buruk. Beberapa dari mereka melarikan diri, dan melakukan hubungan seks di luar nikah dan narkoba."

Juru bicara pemerintah Aceh tidak segera menanggapi permintaan komentar. Tahun ini para pengungsi telah menghadapi permusuhan dan ancaman bahwa perahu mereka akan dikembalikan.

Pekan lalu, para pengunjuk rasa di pulau Sabang, Aceh, membongkar tenda-tenda yang didirikan sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya,

---

---

seperti yang ditayangkan di televisi lokal Indonesia. Bahkan warga lokal ikut mengancam akan mendorong perahu mereka kembali ke laut.

Babar Baloch, juru bicara UNHCR untuk wilayah Asia, mengatakan badan tersebut "khawatir" dengan laporan tersebut, yang dapat membahayakan nyawa mereka yang berada di atas kapal.

Kedatangan cenderung melonjak antara bulan November dan April, ketika laut lebih tenang, dan para Rohingya naik perahu ke negara tetangga Thailand dan Indonesia serta Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim.

"Terlalu banyak orang Rohingya di Aceh," kata Desi Silvana, 30 tahun, salah seorang pengungsi yang tinggal di daerah tersebut. "Tahun ini ada ratusan, bahkan ribuan yang datang."

Sekitar 135 pengungsi Rohingya yang tiba akhir pekan lalu telah dipindahkan ke kantor gubernur provinsi setelah sebuah organisasi di Kabupaten Aceh Besar menolak mereka, kata media. Tidak jelas apa yang memicu penolakan tersebut, yang juga muncul di media sosial.

"Saya tidak mau membayar pajak jika digunakan untuk Rohingya," kata seorang pengguna dengan nama akun trianiwiji9 di platform sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter. Pengguna lain menggambarkan Rohingya sebagai "parasit".

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, (8/12/2023), Presiden Indonesia Joko Widodo menyalahkan lonjakan kedatangan baru-baru ini sebagai akibat dari aksi perdagangan manusia. Presiden Joko Widodo kemudian berjanji untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk menawarkan tempat penampungan sementara.

Selama bertahun-tahun, Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Secara umum bagi warga Myanmar, mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan, ditolak kewarganegaraannya dan menjadi sasaran pelecehan oleh militer serta etnis mayoritas Burma.

---

8. <https://news.republika.co.id/berita/s4fhm5502/mui-aceh-jangan-provokasi-masyarakat-untuk-menolak-rohingya>

---

---

## MUI Aceh: Jangan Provokasi Masyarakat untuk Menolak Rohingya



REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau MUI Provinsi Aceh meminta semua pihak untuk tidak memprovokasi masyarakat agar menolak pendaratan imigran Muslim Rohingya yang masuk ke Tanah Rencong itu.

"Kita minta semua pihak tidak memprovokasi masyarakat untuk menolak (pengungsi Rohingya)," kata Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali, di Banda Aceh, Senin (20/11/2023).

Pria yang akrab disapa Lem Faisal ini menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan bahwa Aceh memiliki kewajiban moral untuk menerima Rohingya. Hanya saja, sejauh ini diduga ada pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat.

"Cuma permasalahannya ada pihak yang memprovokasi masyarakat. Jadi, masyarakat tidak masalah apa pun," ujar Ketua PWNU Aceh itu.

Lem Faisal mengatakan, MPU Aceh meminta keseriusan dan perhatian dari pemerintah pusat terkait penanganan Rohingya itu karena kasus pengungsi ini sudah berulang terjadi di Aceh.

"Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian, solusi atau membantu Pemerintah Aceh, jangan sebaliknya membiarkan pengungsi Rohingya begitu saja. Jangan tutup mata terhadap permasalahan Rohingya yang terdampar di Aceh," katanya.

Lem Faisal juga mengimbau semua pihak agar dapat memberikan pelayanan serta bantuan kepada para imigran Muslim tersebut.

"Terima dulu mereka dengan baik, permasalahan setelah itu bisa dibicarakan kembali," ujarnya.

---



---

Dia juga berharap pemerintah pusat serius sesuai Undang-Undang atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengungsi luar negeri yang sudah ada agar tidak membiarkan masyarakat berlaku secara alamiah seperti itu dalam hal penanganan Muslim Rohingnya.

Dalam kurun waktu sepekan terakhir Aceh didatangi lima gelombang pengungsi Muslim Rohingnya, yakni tiga kapal di wilayah Kabupaten Pidie, satu kapal di Bireuen dan satu kapal di Aceh Timur.

Kedatangan kapal terakhir yang membawa 249 imigran di wilayah Jangka Bireuen pada Kamis (16/11/2023) ditolak warga. Kemudian mereka pindah ke pesisir Aceh Utara, dan juga mendapatkan penolakan setelah diberi makanan hingga pakaian.

Selanjutnya, secara diam-diam para imigran tersebut pada Minggu (19/11) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB mereka mendarat ke wilayah tempat pendaratan ikan (TPI) Lapang Barat Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.

- 
9. [https://news.republika.co.id/berita/s4dk1j335/ratusan-imigran-rohingya-ditolak-di-tiga-tempat-di-aceh#google\\_vignette](https://news.republika.co.id/berita/s4dk1j335/ratusan-imigran-rohingya-ditolak-di-tiga-tempat-di-aceh#google_vignette)

#### **Ratusan Imigran Rohingnya Ditolak di Tiga Tempat di Aceh**



REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Sebanyak 249 orang imigran Rohingnya kembali mendarat di pesisir pantai Aceh, di kawasan tempat penampungan ikan Lapang Barat Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh.

---

---

"Para pengungsi Rohingya itu masih di TPI Lapang Barat, untuk sementara mereka sudah ditangani," kata Camat Gandapura Bireuen Azmi ketika dikonfirmasi dari Banda Aceh, Ahad (19/11/2023)

Azmi mengatakan masyarakat setempat sudah membantu memberikan kebutuhan makanan hingga pakaian kepada para imigran.

"Tapi, ini masyarakat di sana masih menolak dan kita sudah koordinasi juga dengan UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) terkait kedatangan para imigran Rohingya ini," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, para imigran tersebut adalah mereka yang sebelumnya di tolak oleh masyarakat Jangka Bireuen, hingga kemudian mendarat di Aceh Utara.

Mereka kembali mendapat penolakan dari masyarakat Aceh Utara hingga kapal yang mengangkut pengungsi didorong lagi ke lautan. Akhirnya hari ini para imigran Rohingya itu mendarat di wilayah Lapang Barat Bireuen.

"Mereka itu ditolak dari Jangka Bireuen, kemudian ke Ulee Madon, Aceh Utara, dan akhirnya ke sini. Ini orang yang sama," kata Azmi.

Selain 249 orang pengungsi di Bireuen, sebanyak 220 orang imigran Rohingya hari ini juga telah mendarat di kawasan pesisir Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, Aceh. Namun, hingga kini belum ada penanganan khusus.

Tak hanya itu, hari ini juga telah ditemukan sebanyak 35 orang warga Rohingya di sebuah truk setelah dilaporkan mendarat dari sebuah kapal di kawasan pantai di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur.

Ke-35 imigran yang diamankan dari sebuah truk kuning yang ditutupi terpal tanpa nomor polisi itu terdiri atas 18 orang laki-laki dan 17 orang perempuan serta anak-anak. Kini mereka sudah dievakuasi ke Idi Sport Center Idi Rayeuk, Aceh Timur.

---

**10.** <https://www.republika.id/posts/48669/mui-tidak-manusiawi-biarkan-pengungsi-rohingya-kembali-ke-lautan>

---

---

## MUI: Tidak Manusiawi Biarkan Pengungsi Rohingya Kembali ke Lautan

JAKARTA — Gelombang eksodus pengungsi Rohingya ke Indonesia diwarnai



penolakan sebagian masyarakat, khususnya di Aceh. Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas, kedatangan para pengungsi ke Aceh, Medan, dan Riau memang menjadi masalah secara ekonomi karena Pemerintah Indonesia harus menyediakan makan, minum, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya.

Hanya saja, Buya Anwar mengungkapkan, jika menolak pengungsi dan membiarkan mereka kembali terkatung-katung di tengah lautan tanpa ada kejelasan tujuan ke negara mana akan berlabuh, itu justru tidak manusiawi. Buya Anwar menjelaskan, mereka sebagai manusia juga punya hak untuk hidup dengan tenang, damai, sejahtera dan bahagia.

“Seperti diketahui, jumlah pengungsi Rohingnya di Indonesia saat ini ada sekitar 1.487 orang, sebuah jumlah yang tidak kecil tentunya. Oleh karena itu, kita melihat masalah pengungsi Rohingnya ini seperti dikatakan Wapres, merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan solusinya, apalagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila keduanya yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka tidak dapat tidak kita harus bisa berbuat untuk membantu mereka,” ujar Buya Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (8/12/2023).

Untuk itu, Buya Anwar menjelaskan, dalam menghadapi kasus pengungsi dari Rohingnya, MUI mendukung sikap Wapres agar para pengungsi tersebut jangan dibiarkan tersebar di berbagai daerah, tapi ditempatkan di sebuah pulau agar lebih mudah mengurus dan mengawasinya seperti yang pernah Indonesia lakukan kepada pengungsi dari Vietnam tahun 1979-1996. Saat itu, para pengungsi Vietnam yang jumlahnya sekitar 250 ribu orang, ditempatkan di Pulau Galang sebagai tempat penampungan.

---

---

“Sikap ini penting untuk diambil oleh pemerintah bagi meminimalkan masalah dan bagi memudahkan kita berbicara dan bernegosiasi, serta mencari solusi bersama UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees ) tentang tindakan dan langkah apa yang terbaik kita lakukan bagi para pengungsi tersebut, agar mereka sebagai manusia juga bisa hidup dengan aman, tenteram, damai, dan bahagia di bumi milik kita bersama ini,” ujar Buya Anwar.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka berniat menjadikan Pulau Galang di Kota Batam, Riau, sebagai lokasi penampungan pengungsi Rohingya. Dengan alasan kemanusiaan, Ma'ruf Amin mengatakan, Pulau Galang sempat digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya beberapa puluh tahun silam.

Wapres mengatakan, kedatangan pengungsi Rohingya yang kini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar-pemangku kepentingan. Penempatannya di mana? “Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu,” kata Kiai Ma'ruf se usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-GOV) Ke-3 Tahun 2023 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau, tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. "Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang," kata Mahfud se usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Mahfud tidak menjelaskan secara terperinci alasannya menolak ide untuk menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini, Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.

Sekretaris Komisi C Bidang Dakwah, Generasi Muda dan Keluarga pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ustazah Rahmatillah Rasyidin mengaku heran dengan bentuk kedatangan orang-orang Rohingya di Aceh Utara. Ustazah Rahmatillah

---

---

menjelaskan, orang-orang Rohingya itu datang secara bergelombang. Menurut dia, ada pihak yang mengarahkan mereka untuk pergi ke Aceh. "Yang menjadi pertanyaan, kenapa kedatangannya mesti terjadi gelombang per gelombang, berkoloni seperti," tuturnya, Jumat (8/12/2023).

Menurut Ustazah Rahmatillah, persoalan ini tidak lagi seolah-olah ada pihak yang sengaja menelantarkan orang-orang Rohingya ke Aceh khususnya, tetapi memang telah terjadi kasus tersebut. Dia mengatakan, persoalan menyangkut Rohingya berkaitan dengan masalah perdagangan orang (human trafficking). Menurut dia, masalah ini perlu diusut tuntas.

Pada masa awal kedatangannya, terang Ustazah Rahmatillah, orang-orang Rohingya tiba di Aceh Utara dengan armada-armada kapal yang besar. Belakangan ini, banyak kasus yang memang meresahkan masyarakat. Di antaranya, sejumlah orang Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsian, dan pencurian.

Dia juga mengungkapkan, MPU Aceh beberapa tahun lalu telah menggalang dana, termasuk dari para anggota MPU Aceh, untuk membantu orang-orang Rohingya. MPU Aceh saat itu juga menerima donasi dari pihak-pihak lain dalam upaya membantu Rohingya. MPU Aceh juga melakukan gerakan "breuh sicupak" (segenggam beras).

Ia menyampaikan, MPU Aceh sudah memperhatikan asas kemanusiaan. Dalam konteks sekarang ini, diperlukan solusi penanggulangan secara bersama-sama agar tidak ada efek negatif, terutama bagi anak cucu pada masa mendatang menyusul isu negatif yang bermunculan beberapa waktu terakhir.

Polres Pidie pun telah melakukan penindakan terhadap human trafficking. Pada 7 Desember 2023 lalu, Polres Pidie menyatakan bahwa agen penyelundup etnis Rohingya memperoleh keuntungan hingga Rp 3,3 miliar dari imigran yang dibawa ke perairan pantai Kabupaten Pidie.

Sebelumnya, pada Selasa (14/11/2023), sebanyak 196 imigran etnis Rohingya kembali terdampar di pantai Kemukiman Kalee Gampong Batee Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Aceh. "Mereka mengambil keuntungan dari setiap penumpang kapal dengan beban nominal berbeda-beda yang harus dibayar," kata Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali.

---

Imam menuturkan, terbongkarnya bayaran tersebut setelah Polres Pidie menangkap Husson Muktar (70) pria kelahiran Sokoreya Bangladesh yang tinggal di Corg Bazer, Moloji Para Word, Bangladesh dan telah mempunyai card UNHCR No B0201762. HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia.

- 
11. <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/22/ketua-mpu-aceh-penolakan-rohingya-bukan-murni-dari-masyarakat-aceh-kita-wajib-bantu-3-hari>

**Ketua MPU Aceh: Penolakan Rohingya Bukan Murni dari Masyarakat Aceh, Kita Wajib Bantu 3 Hari**



SERAMBINNEWS.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali menyebut, penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh.

Hal itu disampaikan dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Rabu (22/11/2023).

Dia bercerita, sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin.

Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini.

"Dan ini sangat kita sesalkan karena penolakan ini hasil pendalaman kami tidak murni datang dari masyarakat," kata ulama yang akrab disapa Lem Faisal itu.

"Ada semacam provokasi dari pihak tertentu yang membuat masyarakat melakukan penolakan dan penolakan ini bukan jiwa masyarakat Aceh," tambahnya.

---

---

Sebab menurutnya, peribahasa "peumulia jamee adat geutanyoe" sudah menjadi budaya bagi masyarakat Aceh sejak bertahun-tahun.

Semenyara mengenai isu para pengungsi Rohingya yang terkesan jorok dan hal-hal negatif lainnya, menurut Ketua MPU Aceh itu mesti dimaklumi karena faktor psikologis mereka.

Dia sendiri pernah berkunjung ke kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh yang serba kekurangan fasilitas seperti mandi dan sebagainya selama bertahun-tahun.

Menurut Ketua MPU itu, hal-hal seperti ini tidak boleh menjadi alasan menolak warga etnis Rohingya ke Aceh.

"Karena ajaran agama kita bahwa tiga hari kita diwajibkan untuk memberikan bantuan, makanan dan obat-obatan dan sebagainya," ungkap Lem Faisal.

"Setelah tiga hari itu tidak lagi berkewajiban tapi masuk dalam kategori sunnah," tambahnya.

Pemerintah Pusat Tak Boleh Abai

Ketua MPU Aceh itu menganggap, pemerintah pusat telah abai soal human trafficking (perdagangan manusia) pengungsi Rohingya, sehingga berimbas ke masyarakat Aceh.

"Penting kita dorong ini pemerintah pusat, jangan abai atau tidak peduli terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh dalam rangka memberikan bantuan kepada Rohingya," kata Lem Faisal.

Pihaknya dulu pernah membicarakan persoalan ini ke Pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi.

Kemudian Pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda.

"Orang Aceh sudah sangat peduli selama ini, bahkan dulu kita kumpul beras kita antar. Luar biasa masyarakat kita," ungkap Lem Faisal.

---



---

"Makanya kalau ada penolakan ini bukan murni, karena masyarakat kita tetap peduli dan empati walau dengan hal-hal kecil," pungkasnya.

---

12. <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/12/penolakan-pengungsi-muslim-rohingya-di-aceh-menjadi-sorotan-media-arab-awalnya-terima-kini-nolak>

**Penolakan Pengungsi Muslim Rohingya di Aceh Menjadi Sorotan Media Arab:  
Awalnya Terima, Kini Nolak**



SERAMBINNEWS.COM – Penolakan masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi muslim Rohingya mendapat sorotan dari media-media internasional.

Kantor berita yang berbasis jazira Arab - Qatar, Al Jazeera misalnya, melaporkan bahwa masyarakat Aceh sebelumnya menerima pengungsi Rohingya ini dengan penuh kehangatan.

Namun ketika gelombang kedatangan terjadi pada pertengahan November 2023, masyarakat Aceh mulai menyuarakan penolakan.

“Masyarakat Aceh di Indonesia sebelumnya menerima pengungsi, ketegangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kedatangan,” laporan Al Jazeera yang diposting pada Minggu (10/12/2023).

Diketahui, sebanyak 315 orang lebih tiba dalam dua gelombang pada Minggu (10/12/2023) di Aceh.

Satu kapal berisi 135 muslim Rohingya mendarat di kawasan Pantai Kreung Raya, Aceh Besar

---

---

Sementara kapal lainnya mendarat di pantai Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Pidie dengan jumlah 180 orang.

”Kami hanya ingin mencari tempat yang aman,” kata seorang pengungsi kepada Al Jazeera di tempat penampungan sementara di bibir pantai.

“Kami tahu kami mungkin mati di laut, tapi akhirnya kami selamat. Hanya itu yang kami inginkan untuk anak-anak kami,” katanya lagi.

Media itu juga menulis sub judul ‘Pantai yang tidak ramah’ dalam pemberitaan tersebut.

Dalam laporannya, dikatakan bahwa penduduk di Aceh tidak akan menyediakan dana, perbekalan, atau perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang datang.

“Mereka (penduduk di Aceh) juga tidak ingin mereka (pengungsi Rohingya) tinggal di daerah tersebut,” tulisnya.

Media itu juga mengutip pernyataan Pemerintah daerah di Pidie yang mengatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab menyediakan tenda, atau kebutuhan dasar lainnya, atau menanggung biaya apa pun bagi para pengungsi.

Media itu juga mengutip pernyataan warga Aceh, Rijalul Fitri, kepala desa Blang Raya di Aceh.

Mereka tidak ingin pengungsi Rohingya berada di desa mereka.

“Kami begadang semalaman agar tidak mengizinkan mereka berlabuh (dan mendarat), tapi mereka tiba,” katanya.

Fitri bersikukuh para pengungsi harus direlokasi. “Mereka tidak bisa tinggal di sini,” katanya.

Al Jazeera juga menyoroti aksi demonstrasi di Kota Sabang yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya.

“Lebih dari 100 pengunjuk rasa terjadi di Kota Sabang di Aceh, di mana terdapat tempat penampungan sementara, bentrok dengan polisi saat mereka menyerukan agar pengungsi Rohingya direlokasi” tulisnya.

---

---

Fitri mengutarakan kepada media itu bahwa warga Aceh ini orang miskin dan kenapa mereka tidak menggunakan uang perjalanan itu untuk membantu masyarakat Aceh.

“Kami menolak Rohingya,” kata pengunjung rasa lainnya.

“Kami ingin mereka dipindahkan secepatnya. Kami tidak ingin tertular penyakit yang mereka bawa,” ujarnya.

Sementara itu, Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR), Faisal Rahman, mengatakan organisasi tersebut telah berusaha meyakinkan masyarakat setempat.

“Kami terus menjelaskan situasi ini kepada masyarakat dan memastikan bahwa mereka tidak akan terbebani dengan penanganan pengungsi,” katanya, mengakui bahwa tempat penampungan yang ditunjuk melebihi kapasitas.

Namun pemerintah berupaya menyediakan tempat berlindung karena jumlah pengungsi yang datang sangat tinggi.

- 
13. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/10/ulama-aceh-minta-masyarakat-hentikan-penolakan-desak-pemerintah-segera-relokasi-pengungsi-rohingya>  
**Ulama Aceh Minta Masyarakat Hentikan Penolakan, Desak Pemerintah Segera Relokasi Pengungsi Rohingya**



SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Ulama Aceh Abi Hasbi Albayuni meminta kepada masyarakat untuk menghentikan suara penolakan terhadap pengungsi Rohingya.

Abi Hasbi juga mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman.

---

---

“Secara pribadi saya melihat bahwa seharusnya masyarakat tidak boleh menolak, apalagi ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya di Banda Aceh, Senin (8/1/2024).

Pimpinan Dayah Thalibul Huda itu menambahkan, segala sesuatu isu tentang etnis Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar.

Sehingga ia mengajak masyarakat Aceh untuk tabayyun atau mencari kejelasan saat menerima berita supaya tidak terpengaruh dengan informasi keliru.

“Jadi kita jangan percaya dengan isu di luar, sementara kita tidak percaya dengan pemerintah kita sendiri,”

“Kita bisa langsung bertatap muka, kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanya, bisa langsung tabayyun,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Abi Hasbi, ulama sudah menyerukan untuk peduli kepada pengungsi Rohingya, sehingga ia berharap agar masyarakat provinsi paling barat Indonesia itu bisa terbuka menerima pengungsi Rohingya yang berada di Aceh.

“Karena kalau kita mengingat kita sendiri orang Aceh di konflik itu, terkatung-katung juga kita dulu,”

“sehingga kita lari juga ke negara orang, tapi ditampung di negara orang. Itu juga harapan dari kita untuk Rohingya,” tutur Abi Hasbi.

Disisi lain, Abi Hasbi meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Meseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh ke tempat penampungan sementara yang lebih layak.

“Saya melihat ini fasilitas yang tidak layak untuk mereka, sementara kita memiliki fasilitas yang lebih baik,”

“Saya berharap kepada pemerintah Aceh untuk segera relokasi penempatan mereka ke tempat lebih layak, lebih manusiawi,” katanya.

---

---

Pimpinan Dayah Thalibul Huda itu menilai basement gedung Balai Meseuraya Aceh tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya itu, yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan.

Ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut, salah satunya pilihannya seperti kompleks gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh.

- 
14. <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/31/selebaran-beredar-di-medsos-massa-gerah-akan-demo-pengungsi-rohingya-di-bma-ini-tuntutannya>  
**Selebaran Beredar di Medsos, Massa Gerah akan Demo Pengungsi Rohingya di BMA, Ini Tuntutannya**



SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Usai demo yang berujung traumanya anak-anak pengungsi Rohingya, kini ada massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Aceh (Gerah) merencanakan demo di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh.

Demo dengan isu utama menolak keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh itu diagendakan akan berlangsung pada Selasa (2/1/2024) pukul 9.00 WIB.

Dalam sebaran yang beredar di media sosial (medsos) itu, pihak Gerah menolak keberadaan imigran Rohingya karena Aceh masih dalam keadaan susah dan jadi daerah termiskin se-Sumatera.

---

---

Selain itu, pihaknya menganggap selama ini banyak yang menjual isu kemanusiaan tanpa mempertimbangkan perasaan masyarakat setempat.

"Menolak pemberian lahan atau tanah untuk posko penampungan Rohingya serta mendesak Pj Gubernur Aceh dan stakeholder agar menyelesaikan dan memindahkan imigran Rohingya dari Aceh," tulisnya dikutip, Minggu (31/12/2023).

YARA: Rohingya Wajib Ditolong

Sementara itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH, MH menyampaikan, masyarakat wajib menolong pengungsi Rohingya secara kemanusiaan dan semua itu ada regulasinya.

Aturan menolong pengungsi dijelaskannya termuat berdasarkan Konvensi Pengungsi PBB Tahun 1951 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Bila imigran mendapat hak dari negara di mana yang bersangkutan berasal, maka pengungsi ini tidak demikian.

"Karena pengungsi ini seperti warga dunia. Dan yang memberikan hak mereka adalah UNHCR," jelas Safaruddin saat Rapat Koordinasi YARA Se-Aceh yang dilaksanakan di Hotel Jeumpa Mannheim, Banda Aceh, Sabtu-Minggu (23-24/12/2023) lalu.

"Sehingga status Rohingya itu pengungsi, tidak bisa ditolak," tambahnya.

Kemudian ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan antara pengungsi Rohingya dan warga lokal, menurutnya, hal tersebut tentu ada sebab akibat yang mengikutinya.

Dia mencontohkan terkait para pengungsi tersebut yang kerap BAB sembarangan dan meresahkan warga setempat.

Hal ini karena memang tidak adanya toilet yang disediakan kepada pengungsi Rohingya saat mereka mendarat atau bermukim sementara di sebuah wilayah.

"Kalau ada WC mana mungkin BAB sembarangan," kata Safaruddin.

Selanjutnya terkait beberapa pengungsi Rohingya yang tidak bisa membaca Al-Quran, menurutnya justru di sinilah kesempatan masyarakat Aceh jika ingin meraup pahala.

---

---

Caranya dengan mengajari mereka yang tidak cukup ilmu untuk mengaji dan tidak punya sekolah di tempat asalnya ini, agar belajar agama saat di Aceh.

"Kalau tidak bisa ngaji kita ajari," kata Safaruddin.

"Mereka kan cuma transit ke sini menuju negara tujuan. Karena dari kampungnya tak ada ilmu, ngaji tidak, sekolah pun tidak," tambahnya.

Dijelaskannya, para pengungsi Rohingya ini dianggap sebagai warga tidak memiliki negara sebab tidak diakui oleh bangsa asalnya.

Ketua YARA itu menegaskan, demi kemanusiaan siapapun wajib ditolong tanpa memandang suku, agama dan bangsa.

"Ketika membutuhkan, YARA siap hadir. Rohingya tidak ada yang tampung, kita siap bantu," kata Safaruddin.

Pihaknya juga akan membangun komunikasi dengan UNHCR terkait penanganan para pengungsi ini agar tidak terlunta-lunta lagi.

"Sayang kita lihat, sapi saja kalau sudah malam kita jemput dari hutan, ini malah manusia dengan kondisi seperti ini kita kasih ke hutan," pungkasnya.(\*)

- 
15. <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/22/penolakan-rohingya-ke-aceh-prof-humam-hamid-masalah-kemanusiaan-usulkan-tempat-di-sebuah-pulau>

**Penolakan Rohingya ke Aceh, Prof Humam Hamid: Masalah Kemanusiaan, Usulkan Tempat di Sebuah Pulau**





---

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Humam Hamid, tidak membenarkan aksi penolakan imigran Rohingya ke Aceh mengingat ini merupakan masalah kemanusiaan.

Menurut Prof Humam, sebaiknya Imigran Rohingya tersebut ditempatkan di sebuah Pulau yang jauh dari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prof Humam saat dihubungi Serambinews.com terkait pandangannya soal Imigran Rohingya yang terus berdatangan, Rabu (22/11/2023).

Menurut Prof Humam yang juga Sosiolog ini, permasalahan Imigran Rohingya merupakan permasalahan kompleks, dimana jika ditelusur lebih jauh ada bisnis dari pihak ketiga yang terlibat di dalamnya.

Imigran Rohingya pun mau tidak mau kemudian memilih Aceh sebagai tempat transit mereka mengingat beberapa negara juga ikut menolak kehadiran mereka.

Namun yang sangat disayangkan, penerimaan warga Aceh terhadap Imigran Rohingya berakhir kecewa hingga berujung penolakan usai mereka tidak menaati peraturan dan norma-norma di daerah setempat.

"Tapi ini mau tidak mau, suka tidak suka, hanya ada beberapa tempat Rohingya itu pergi, yang paling dekat ke Bangladesh, mereka sudah kumpul di sana dan mereka juga ke Thai tapi gak diterima, mereka takut kalau ke Thai terdampar di Burma, ke Malaysia juga gak suka lalu ke Aceh, ke Aceh kemudian awalnya diterima tapi kemudian banyak tingkah, ya mereka juga sama juga dengan kita, tingkah kita," kata Prof Humam.

Di satu sisi munculnya tindakan penolakan warga Aceh terhadap imigran Rohingya sangat disayangkan mengingat ini merupakan masalah kemanusiaan.

Apalagi imigran Rohingya terdapat banyak anak-anak dan perempuan, hal ini yang kemudian menjadi sorotan.

"Tapi kalau kita hitung-hitung secara kemanusiaan. Kalau laki-laki muda kita tidak begitu peduli tapi ini anak-anak dan perempuan tua. Jadi ini mesti dicari caranya, kalau menurut saya, masyarakat kita itu marah, itu juga ada dasarnya tetapi bagaimanapun ini kan masalah kemanusiaan," tambah Prof Humam.

---

---

Dalam hal ini, Prof Humam meminta sikap yang jelas dari Pemerintah Pusat agar serius menangani hal ini dan berbicara dengan baik dengan IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk mencari solusi terbaik.

Prof Humam menambahkan, adapun solusi yang saat ini mungkin bisa dijadikan pilihan adalah mencarikan sebuah pulau yang ada di Aceh untuk dijadikan tempat Imigran Rohingya, pisahkan mereka dari masyarakat Aceh dan pulau tersebut nantinya harus dijaga ketat.

"Kasih mereka sebuah tempat. Jadi janganlah mereka diusir kemana mereka pergi kalau diusir? Kembali ke Burma? gak mungkin, dibunuh. Sekarang hampir semua negara gak mau nerima dan ini masalah," timpalnya.

Adapun terkait biaya Imigran Rohingya ketika sudah berada di sebuah pulau, dalam hal ini Prof Humam menegaskan bukan kewenangan pemerintah Aceh, melainkan dari pemerintah pusat yang bekerjasama dengan organisasi dunia IOM, UNHCR hingga NGO Internasional lainnya.

"Mereka berbicara dengan pemerintah pusat dan dengan sejumlah lembaga lain seperti IOM UNHCR dan sejumlah NGO Internasional yang mengurus pengungsi. Tempatkan mereka di sebuah tempat yang terputus hubungannya dengan daratan dan dijaga ketat, kemudian lembaga NGO yang punya sumber daya juga turun," pungkasnya.

- 
16. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/04/warga-tolak-penempatan-pengungsi-rohingya-di-asrama-pmi-ajuen-jeumpet-aceh-besar-ini-alasannya>

**Warga Tolak Penampungan Pengungsi Rohingya di Asrama PMI Ajuen Jeumpet Aceh Besar, Ini Alasannya**



---

SERAMBINNEWS.COM, JANTHO - Warga Kecamatan Darul Imarah dan Peukan Bada, Aceh Besar, menolak rencana penampungan sementara pengungsi Rohingya di Asrama PMI kawasan Ajuen Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Penolakan itu mereka sampaikan dalam rapat bersama yang diinisiasi PMI Aceh, terkait rencana penempatan sementara pengungsi Rohingya di Asrama PMI di Ajuen Jeumpet, Rabu (3/1/2024) kemarin.

Rapat lintas sektor itu dihadiri oleh Ketua PMI Aceh, Perwakilan dari UNHCR, Forkopimcam Darul Imarah dan Peukan Bada, para Keuchik serta tokoh masyarakat Ajuen dan Jeumpet Ajuen.

Di mana dalam rapat tersebut, warga Kecamatan Darul Imarah dan Peukan Bada, Aceh Besar, menolak ditempatkan pengungsi Rohingya di PMI Ajuen Jeumpet, karena menyangkut kenyamanan dan kesiapan masyarakat secara mental.

Selain itu, mereka berasumsi arus pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Aceh, sehingga sangat berkemungkinan akan ditempatkan juga di Asrama PMI Ajuen Jeumpet yang bisa membuat kenyamanan masyarakat sekitar terganggu.

Terutama gampong-gampong yang terdekat dengan Asrama PMI Ajuen.

Selain itu, lokasi sekitar asrama adalah kawasan yang padat penduduk dan pemukiman warga.

Camat Darul Imarah, Muhammad Basir, mengatakan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi asrama PMI tersebut sangat keberatan dengan rencana penempatan para pengungsi Rohingya tersebut.

Pasalnya, lokasi tersebut belum memadai untuk dijadikan tempat penampungan etnis Rohingya perihal masalah keamanan.

Terlebih saat ini Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pada Februari mendatang.

“Petugas kita sedang menjaga pemilu, mereka harus jaga lagi para pengungsi ini. Sehingga faktor keamanan menjadi salah satu penyebabnya,” kata Basir saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2024).

---

Selain itu, daerah Ajuen yang merupakan kawasan padat penduduk, masyarakat sedikit merasa takut perihal informasi yang berkembang saat ini terkait perilaku etnis Rohingya itu.

“Banyak yang kabur. Takut nanti masyarakat kita yang menjadi korban,” pungkasnya. (\*)

- 
17. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/04/cegah-pendaratan-rohingya-polisi-bersama-nelayan-jaga-ketat-kawasan-pesisir-bireuen-setiap-malam>  
**Cegah Pendaratan Rohingya, Polisi Bersama Nelayan Jaga Ketat Kawasan Pesisir Bireuen Setiap Malam**



SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN – Mencegah pengungsi Rohingya masuk ke Bireuen, kawasan pesisir mulai dari Samalanga sampai Gandapura masih tetap dijaga bersama jajaran Polres Bireuen, dan para nelayan, serta warga.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, SH, MH didampingi Kabag Ops, Kompol Mukhtar kepada Serambinews.com, Kamis (4/1/2024), di sela-sela pengamanan aksi mahasiswa menolak pengungsi Rohingnya di halaman Kantor Puspemkab Bireuen.

Disebutkan Kapolres, setiap malam secara bergiliran jajaran Polres Bireuen bersama Polsek, para nelayan dan warga terus memantau kawasan pesisir.

Selain itu, juga mencari informasi dari para nelayan ada tidaknya perahu atau boat pengungsi Rohingya yang hendak merapat ke Bireuen.

Penjagaan bersama, kata Kabag Ops, adalah langkah pencegahan agar para pengungsi tidak sempat mendarat di kawasan Bireuen.

---

---

“Kehadiran berbagai unsur memantau kawasan pesisir dan juga meminta kekompakan masyarakat sebagai upaya agar Bireuen tetap aman dan upaya mencegah orang luar masuk ke Bireuen melalui laut,” urainya.

Selain pemantauan kawasan pesisir, lanjut Kabag Ops, jajaran Polres Bireuen juga melakukan koordinasi dengan berbagai kalangan, baik unsur Forkopimda maupun elemen masyarakat lainnya sebagai upaya meningkatkan pengamanan, keamanan dan juga ketertiban menjelang pelaksanaan Pemilu 14 Februari mendatang.

“Kami bersama nelayan, warga dan berbagai pihak lainnya kadang-kadang tengah malam melakukan koordinasi ketika ada sesuatu yang lain di kawasan laut dan memperkuat penjagaan di kawasan pesisir,” sebutnya.(\*)

- 
18. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/03/rohingya-dalam-kacamata-kemanusiaan-panglima-laot-singgung-mata-dunia-saat-bantu-tsunami-aceh>

**Rohingya dalam Kacamata Kemanusiaan, Panglima Laot Singgung Mata Dunia saat Bantu Tsunami Aceh**



SERAMBINEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar ikut menyoroti tindakan penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya belakangan ini. Menurutnya, kondisi ini mengingatkan bagaimana mata dunia ikut membantu Aceh saat musibah Tsunami 2004 lalu.

Hal tersebut disampaikan Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar dalam program Serambi Spotlight yang tayang pada YouTube Serambinews.com, Rabu (3/1/2024) dipandu host Bukhari M Ali.

---

Dia mengatakan, Aceh baru saja memperingati 19 tahun Tsunami pada 26 Desember 2023 lalu, tentu ini menjadi momen untuk merefleksikan bagaimana seluruh dunia membantu Aceh pada saat itu.

"Kita baru saja peringatan ke-19 tahun Tsunami, ini merupakan tsunami yang dahsyat dan ini tidak bosan-bosannya kita mengulang bahwa ini adalah takdir dari Allah SWT, kemudian Tsunami meluluhlantakkan Aceh, korbannya lebih dari 200 ribu," kata Azwir Nazar.

Karena dasar nurani kemanusiaan, sehingga seluruh dunia pada saat itu ikut membantu Aceh.

"Kemudian muncul nurani kemanusiaan dari seluruh dunia, bangsa-bangsa datang ke Aceh, dari semua negara, dari etnis, warna kulit dan agama yang berbeda datang ke Aceh membantu meringankan sehingga kita rakyat Aceh ini bisa bangkit dari Tsunami," sambungnya.

Baca juga: Aceh Kenapa Tolak Rohingya, Panglima Laot: Kemakan Opini MEDSOS, Kaum Ibu hingga Milenial Targetnya

Azwir Nazar yang juga penyintas Tsunami Aceh ikut merasakan bagaimana sedihnya masa-masa kelam itu. Dia mengungkap, jika tanpa bantuan masyarakat dunia, mungkin Aceh tidak bisa bangkit seperti sekarang ini.

"Saya merasakan sendiri bagaimana musibah tsunami yang keluarga kita juga habis, hanya tinggal berdua," timpalnya.

Berkaca pada baiknya dunia kepada Aceh saat musibah Tsunami 2004, tentunya ini kata Azwir mengingatkan bahwa pentingnya kita sebagai manusia untuk selalu menimbulkan nurani dan kemanusiaan pada siapa saja yang memerlukan bantuan kita, tak terkecuali pengungsi Rohingya.

"Tentu nurani kemanusiaan ini harus selalu muncul di hati kita ketika kita melihat orang lain yang mungkin memerlukan bantuan kepada kita," timpalnya dalam podcast berjudul "Rohingya dalam Kacamata Kemanusiaan".

Aceh Kenapa Tolak Rohingya, Panglima Laot : Kemakan Opini di MEDSOS, Kaum Ibu hingga Milenial Targetnya

---

---

Sekjen Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar atau akrab disapa Teungku Turki mengungkapkan bahwa penolakan pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Aceh baru-baru ini disebabkan oleh pembentukan opini yang sangat masif di media sosial (medsos).

Menurut doktor lulusan Turki itu, adapun pembentukan opini tersebut berupa ujaran kebencian yang dibentuk oleh sekelompok orang lalu disebarakan secara masif berupa flyer hingga video di media sosial.

SERAMBINNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar ikut menyoroti tindakan penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya belakangan ini. Menurutnya, kondisi ini mengingatkan bagaimana mata dunia ikut membantu Aceh saat musibah Tsunami 2004 lalu.

Hal tersebut disampaikan Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar dalam program Serambi Spotlight yang tayang pada YouTube Serambinews.com, Rabu (3/1/2024) dipandu host Bukhari M Ali.

Dia mengatakan, Aceh baru saja memperingati 19 tahun Tsunami pada 26 Desember 2023 lalu, tentu ini menjadi momen untuk merefleksikan bagaimana seluruh dunia membantu Aceh pada saat itu.

"Kita baru saja peringatan ke-19 tahun Tsunami, ini merupakan tsunami yang dahsyat dan ini tidak bosan-bosannya kita mengulang bahwa ini adalah takdir dari Allah SWT, kemudian Tsunami meluluhlantakkan Aceh, korbannya lebih dari 200 ribu," kata Azwir Nazar.

Karena dasar nurani kemanusiaan, sehingga seluruh dunia pada saat itu ikut membantu Aceh.

"Kemudian muncul nurani kemanusiaan dari seluruh dunia, bangsa-bangsa datang ke Aceh, dari semua negara, dari etnis, warna kulit dan agama yang berbeda datang ke Aceh membantu meringankan sehingga kita rakyat Aceh ini bisa bangkit dari Tsunami," sambungnya.

Baca juga: Aceh Kenapa Tolak Rohingya, Panglima Laot: Kemakan Opini MEDSOS, Kaum Ibu hingga Milenial Targetnya

---



---

Azwir Nazar yang juga penyintas Tsunami Aceh ikut merasakan bagaimana sedihnya masa-masa kelam itu. Dia mengungkapkan, jika tanpa bantuan masyarakat dunia, mungkin Aceh tidak bisa bangkit seperti sekarang ini.

"Saya merasakan sendiri bagaimana musibah tsunami yang keluarga kita juga habis, hanya tinggal berdua," timpalnya.

Berkaca pada baiknya dunia kepada Aceh saat musibah Tsunami 2004, tentunya ini kata Azwir mengingatkan bahwa pentingnya kita sebagai manusia untuk selalu menimbulkan nurani dan kemanusiaan pada siapa saja yang memerlukan bantuan kita, tak terkecuali pengungsi Rohingya.

"Tentu nurani kemanusiaan ini harus selalu muncul di hati kita ketika kita melihat orang lain yang mungkin memerlukan bantuan kepada kita," timpalnya dalam podcast berjudul "Rohingya dalam Kacamata Kemanusiaan".

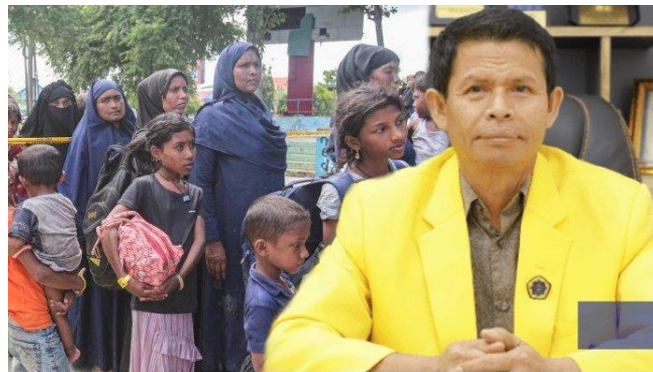
Aceh Kenapa Tolak Rohingya, Panglima Laot : Kemakan Opini di MEDSOS, Kaum Ibu hingga Milenial Targetnya

Sekjen Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar atau akrab disapa Teungku Turki mengungkapkan bahwa penolakan pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Aceh baru-baru ini disebabkan oleh pembentukan opini yang sangat masif di media sosial (medsos).

Menurut doktor lulusan Turki itu, adapun pembentukan opini tersebut berupa ujaran kebencian yang dibentuk oleh sekelompok orang lalu disebarakan secara masif berupa flyer hingga video di media sosial.

- 
19. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/03/rektor-utu-minta-pengungsi-rohingya-diperlakukan-secara-humanis-dan-tidak-anarkis-beri-mereka-waktu>

**Rektor UTU Minta Pengungsi Rohingya Diperlakukan Secara Humanis dan Tidak Anarkis: Beri Mereka Waktu**



---

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH – Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Aceh Barat, Prof Ishak Hasan meminta pengungsi Rohingya agar diperlakukan secara humanis dan tidak anarkis.

Prof Ishak juga meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai universal.

Disisi lain, Rektor UTU Meulaboh ini juga meminta keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh harus memiliki batas waktunya.

Sehingga masyarakat juga ingin kepastian dari pemerintah tentang penempatan Rohingya yang sudah mencapai 1.684 orang.

"Perlakukan mereka secara Humanis, dan nilai-nilai Universal dan tidak anarkis," ucap Prof Ishak, Senin (1/1/2024).

Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi penolakan etnis Rohingya masuk ke kawasan penampungan sementara etnis Rohingya di Balai Meuseraya Aceh (BMA) di Lampriet, Banda Aceh, Rabu (27/12/2023).

Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi penolakan etnis Rohingya masuk ke kawasan penampungan sementara etnis Rohingya di Balai Meuseraya Aceh (BMA) di Lampriet, Banda Aceh, Rabu (27/12/2023). (SERAMBINNEWS.COM/INDRA WIJAYA) Rektor UTU menyampaikan, masyarakat Aceh tidak perlu diajarkan lagi tentang tolong menolong dan perilaku kemanusiaan sudah teruji.

"Jadi Aceh sudah lama menolong etnis Rohingya yang terdampar di Aceh," tuturnya.

Ia menilai, penanganan pengungsi Rohingya di Aceh belum waktunya dilakukan karena tingkat kesehatan provinsi ini masih rendah dan kemiskinan tergolong tinggi.

"Kita masih tergolong orang miskin," ujar Rektor.

Untuk itu, ia berharap kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani pengungsi Rohingya melalui UNCHR dan IOM untuk bertindak cepat.

"Sudah lembaga ini tidak tutup mata," harapnya.

---

---

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Lem Faisal bersama anak-anak Rohingya saat menyerahkan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Gedung BMA, di Banda Aceh, Sabtu (30/12/2023).

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Lem Faisal bersama anak-anak Rohingya saat menyerahkan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Gedung BMA, di Banda Aceh, Sabtu (30/12/2023). (SERAMBINNEWS.COM/HENDRI) Begitu juga lanjutnya, Rohingya yang terdampak di Aceh sangat disayangkan kalau adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dikatakan, dalam *WhatsApp* Grup (WAG) Krue Seumangat Aceh (KSA) bahkan sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang akan dibawa ke Pemerintah Aceh, sebagai saran dan masukan.

- 
20. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/03/terkait-pengungsi-rohingya-kantor-berita-pbb-sebut-mahasiswa-aceh-sudah-termakan-hoaks-di-medsos>

**Terkait Pengungsi Rohingya, Kantor Berita PBB Sebut Mahasiswa Aceh Sudah Termakan Hoaks di Medsos**



SERAMBINNEWS.COM – Aksi pengepungan dan angkut paksa terhadap 137 pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh pada Rabu (27/12/2023), menyedot perhatian dunia.

Sejumlah kantor berita internasional turut menyoroti dan memberitakan aksi mahasiswa Aceh yang mengangkut paksa pengungsi Rohingya dari basement Balai Meseuraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh.

Aksi mahasiswa ini turut direspon oleh Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berada di New York, Amerika Serikat.

---

---

Melalui kantor berita resminya, News.un.org, aksi mahasiswa Aceh tersebut terjadi karena mereka telah terpapar informasi palsu alias hoaks yang berasal dari media sosial.

“Serangan tersebut bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi, namun merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap para pengungsi,” lapor PBB, dikutip Rabu (3/1/2024).

Para pendemo yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memaksa membawa para pengungsi

Para pendemo yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memaksa membawa para pengungsi "manusia perahu" untuk diangkut ke mobil di Balai Meuseraya Aceh (BMA), Selasa (27/12/2023). (SERAMBINEWS.COM/ INDRA WIJAYA)

Pernyataan PBB tersebut selaras dengan hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan tahun 2018.

Di mana, Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang tinggi percaya berita bohong atau hoaks.

Provinsi di ujung barat Indonesia ini bertengger bersama Jawa Barat dan Banten dalam percaya hoaks.

Peneliti LIPI, Amin Mudzakir mengatakan, tangkapan informasi yang diterima dari masyarakat berasal dari media sosial.

Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya sangat terganggu melihat serangan massa mahasiswa di lokasi yang menampung pengungsi di Banda Aceh itu.

Dalam laporannya, massa menerobos barisan polisi dan secara paksa mengangkut 137 pengungsi Rohingya ke dalam dua truk.

Massa mahasiswa itu kemudian memindahkan mereka ke lokasi lain dan insiden tersebut telah membuat para pengungsi syok dan trauma.

“UNHCR masih sangat mengkhawatirkan keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada otoritas penegak hukum setempat untuk mengambil tindakan segera guna

---

---

memastikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa,” kata pernyataan itu.

SERAMBINNEWS.COM – Aksi pengepungan dan angkut paksa terhadap 137 pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh pada Rabu (27/12/2023), menyedot perhatian dunia.

Sejumlah kantor berita internasional turut menyoroti dan memberitakan aksi mahasiswa Aceh yang mengangkut paksa pengungsi Rohingya dari basement Balai Meseuraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh.

Aksi mahasiswa ini turut direspon oleh Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berada di New York, Amerika Serikat.

Melalui kantor berita resminya, News.un.org, aksi mahasiswa Aceh tersebut terjadi karena mereka telah terpapar informasi palsu alias hoaks yang berasal dari media sosial.

“Serangan tersebut bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi, namun merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap para pengungsi,” lapor PBB, dikutip Rabu (3/1/2024).

Para pendemo yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memaksa membawa para pengungsi

Para pendemo yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memaksa membawa para pengungsi "manusia perahu" untuk diangkut ke mobil di Balai Meuseraya Aceh (BMA), Selasa (27/12/2023). (SERAMBINNEWS.COM/ INDRA WIJAYA)

Pernyataan PBB tersebut selaras dengan hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan tahun 2018.

Di mana, Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang tinggi percaya berita bohong atau hoaks.

Provinsi di ujung barat Indonesia ini bertengger bersama Jawa Barat dan Banten dalam percaya hoaks.

Peneliti LIPI, Amin Mudzakir mengatakan, tangkapan informasi yang diterima dari masyarakat berasal dari media sosial.

---

---

Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya sangat terganggu melihat serangan massa mahasiswa di lokasi yang menampung pengungsi di Banda Aceh itu.

Dalam laporannya, massa menerobos barisan polisi dan secara paksa mengangkut 137 pengungsi Rohingya ke dalam dua truk.

Massa mahasiswa itu kemudian memindahkan mereka ke lokasi lain dan insiden tersebut telah membuat para pengungsi syok dan trauma.

“UNHCR masih sangat mengkhawatirkan keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada otoritas penegak hukum setempat untuk mengambil tindakan segera guna memastikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa,” kata pernyataan itu.

---